

LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA/RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI II DPR RI
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

Tahun Sidang	: 2011-2012
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 10 Juli 2012
Waktu	: 09.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI(Gd. Nusantara/KK.III)
Acara	: Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2011
Ketua Rapat	: Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: 29 dari jumlah 50 Anggota Komisi II DPR RI
Hadir Mitra	: - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) beserta jajarannya

1. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 dibuka pukul 09.35 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya dan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait dengan Pembahasan Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2011.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan:
 - a. Realisasi belanja Kementerian Dalam Negeri sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp 13.386.253.309.436,- atau 77,24% dari anggaran sebesar Rp 17.331.387.211.000,-. Realisasi belanja sebesar Rp 13.386.253.309.436,- termasuk hibah langsung berupa jasa yang diterima Kemendagri TA 2011 sebesar Rp 330.285.252.588,-.
 - b. Terkait dengan pengelolaan keuangan, Kemendagri mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2010 dan tahun 2011.

c. Terkait dengan Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2011 terdiri atas Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal dan Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Adapun hasil pemeriksaan tersebut sebagai berikut :

- 1) Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal yang mengungkapkan kemampuan organisasi dalam mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan data keuangan, dengan uraian antara lain:
 - a) Pengesahan dan pencatatan Hibah Langsung berupa Jasa terlambat dilakukan;
 - b) Ketidaksesuaian pengklasifikasian Belanja Barang;
 - c) Pengelolaan dan pemanfaatan sejumlah Aset Tetap belum memadai dan
 - d) Pengelolaan persediaan belum memadai dan belum seluruhnya berdasarkan inventarisasi fisik.
- 2) Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan mengungkapkan adanya 10 temuan pemeriksaan, dengan uraian antara lain:
 - a) Pertanggungjawaban keuangan Bantuan Ormas pada Ditjen Kesbangpol belum tertib;
 - b) Kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan belanja barang;
 - c) Kelebihan pembayaran belanja jasa konsultan dan jasa lainnya;
 - d) Kelebihan pembayaran atas pekerjaan belanja modal;
 - e) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan
 - f) Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak; dan
 - g) Pertanggungjawaban pengeluaran belum didukung bukti administrasi.

Atas temuan yang bersifat administrasi sejumlah 36 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti, dan terhadap temuan yang bersifat kewajiban setor ke Kas Negara sejumlah 10 rekomendasi dengan nilai Rp. 9,59 Milyar telah ditindaklanjuti sebanyak Rp 842,5 juta, sedangkan sisanya Rp 8,75 Milyar akan diselesaikan sesuai dengan rencana aksi, paling lambat minggu ke I bulan Agustus 2012.

4. Sekretaris BNPP menyampaikan :

- a. Realisasi belanja negara BNPP sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 mencapai sebesar Rp 314.519.758.529,- atau 70,68% dari pagu anggaran sebesar Rp 445.000.000.000,-. Adapun rincian realisasi berdasarkan program sebagai berikut:
 - 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNPP dengan pagu anggaran sebesar Rp 264.928.079.000,- telah terealisasi sebesar Rp 200.990.886.223,- atau 75,87%.
 - 2) Program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan pagu anggaran sebesar Rp 180.071.921.000,- telah terealisasi sebesar Rp 113.528.872.306,- atau 63,05%.
- b. Terkait dengan pemeriksaan oleh BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Tetap BNPP Tahun 2011 yang didasarkan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Internal telah diterima pada tanggal 14 Juni 2012.

Terhadap temuan tersebut telah dilakukan tanggapan lebih awal dengan berdasarkan pada Konsep LHP BPK, untuk itu BNPP telah menyusun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi BPK dan telah mulai ditindaklanjuti serta akan diselesaikan sebelum batas akhir tindak lanjut.

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan seluruh jajarannya yang mendapatkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari BPK RI terkait dengan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011. Terhadap berbagai permasalahan yang menjadi temuan BPK RI dan belum selesai ditindaklanjuti, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera menindaklanjuti dan mengupayakan penyelesaiannya sesuai dengan Rekomendasi BPK.
2. Terkait dengan penyerapan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 yang hanya sebesar **77,24%**, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri agar di tahun-tahun yang akan datang lebih efektif dalam perencanaan anggaran, sehingga tingkat penyerapan anggaran bisa lebih dioptimalkan sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Terkait dengan Laporan Keuangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun Anggaran 2011 yang mendapatkan opini **Disclaimer** dari BPK RI, Komisi II DPR RI meminta BNPP dan seluruh jajarannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal Tata Kelola Administrasi dan Keuangannya, agar di tahun-tahun mendatang mampu memperoleh opini yang lebih baik. Terhadap berbagai permasalahan yang menjadi temuan BPK RI, Komisi II DPR RI meminta kepada BNPP untuk segera menindaklanjuti sesuai dengan Rekomendasi BPK.
4. Terkait dengan penyerapan anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun Anggaran 2011 yang hanya sebesar **70,68%**, Komisi II DPR RI meminta kepada BNPP agar di tahun-tahun yang akan datang lebih efektif dalam perencanaan anggaran, sehingga tingkat penyerapan anggaran bisa lebih dioptimalkan sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
5. Terhadap hasil pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun Anggaran 2011, Komisi II DPR RI akan menyampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sebagai acuan dalam rangka pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 11.30 WIB.

KETUA RAPAT,

GANJAR PRANOWO

A-365

